

Kontribusi Ekologi Pemerintahan untuk Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berdaya Saing

Bayu Karunia Putra

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Corresponding Author: bayukaruniaputra7@gmail.com

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekologi pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang berdaya saing. Topik ini dianggap penting karena ekologi pemerintahan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan serta acuan strategis dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah melalui database Publish or Perish, SINTA, dan Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, valid, dan terkini terkait ekologi pemerintahan dan daya saing kebijakan daerah. Analisis data dilakukan melalui kajian pustaka yang mendalam untuk memahami hubungan antara konsep ekologi pemerintahan dengan efektivitas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekologi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan daerah, mendorong inovasi berbasis teknologi, serta memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada ekologi pemerintahan berpotensi menciptakan tata kelola yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern.

Kata Kunci: Berdaya Saing, Ekologi Pemerintahan, Kebijakan, Kontribusi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT: *This article aims to analyze the contribution of governmental ecology in realizing competitive local government policies. This topic is considered important because governmental ecology serves as a fundamental basis for decision-making and a strategic reference in formulating effective and adaptive public policies in the digital era. The study employs a literature review method with a descriptive qualitative approach, where data were obtained from various scientific sources through databases such as Publish or Perish, SINTA, and Google Scholar. Data collection was carried out by reviewing relevant, valid, and up-to-date literature related to governmental ecology and regional competitiveness. Data analysis was conducted through an in-depth literature review to understand the relationship between the concept of governmental ecology and the effectiveness of public policies. The findings indicate that the application of governmental ecology principles enhances the effectiveness and efficiency of local government policies, promotes technology-based innovation, and strengthens regional competitiveness by improving the capacity and knowledge of government officials. Therefore, local government policies oriented toward governmental ecology have the potential to create adaptive, professional, and sustainable governance in facing modern administrative challenges.*

Keywords: *Competitive, Government Ecology, Policy, Contribution, Local Government*

PENDAHULUAN

Terkait dengan proses kebijakan yang memiliki berbagai bentuk dinamika terhadap karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan (Putra et al., 2021). Dikarenakan, dalam hal ini berkaitan sangat erat dengan berbagai aktor-aktor dalam mengambil kebijakan yang memiliki berbagai bentuk kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka, kecenderungan itu terjadi dalam kebijakan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa, ketika menyusun suatu kebijakan, di mana pemerintah daerah melaksanakan proses analisis yang sangat mendalam dan terperinci (Farhaini et al., 2022). Hal itu dilakukan, karena kebijakan itu dapat berhubungan secara langsung dengan adanya proses kebijakan yang lain secara timbal balik dan saling berkaitan erat dalam mekanisme keseimbangan pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah itu sendiri.

Apalagi, ketika menyangkut terjadinya proses pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik yang merupakan langkah awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas (Nurdin, 2019). Ditambah, dengan kehadiran dari seorang pemerintah sebagai pihak yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas (Rukayat, 2017). Maka, inovasi dipandang sebagai kebutuhan, karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, dan mengembalikan kepercayaan publik (Andhika, 2017). Dengan adanya pelayanan publik, maka segala bentuk prosedur dan aturan yang jelas sangat diperlukan, agar pelayanan tidak menemui kendala (Yusriadi & Misnawati, 2017). Karena, tujuan dari adanya pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat, maka dari itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, kesamaan, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Nuril, 2018).

Bilamana, ketika proses analisis yang mendalam dan terperinci itu telah dilakukan dengan melalui cara mengikuti konsep ekologi yang telah diaplikasikan dalam kebijakan pemerintahan tersebut (Putra & Salahudin, 2022). Maka, pemerintah sebagai salah satu sistem yang harus memiliki keseimbangan, agar pada nantinya dapat bekerja secara maksimal. Selain itu juga, demi tercapainya suatu keseimbangan dalam proses sistem pemerintahan, maka seluruh anggota harus paham terkait dengan ekosistem dan bekerja secara sistemik. Karena, hal itu yang dapat di lakukan dengan melalui cara memberikan mekanisme feedback (umpan balik) dengan cara membuka jejaring sosial untuk senantiasa memperoleh informasi secara cepat, aktual, dan akurat. Disisi lain juga, konsep ilmu ekologi yang telah di aplikasikan dalam proses kebijakan pemerintahan itu yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana yang baik, agar pada nantinya dapat meminimalisasikan terkait dengan dampak kebijakan yang sekiranya dapat merugikan subsistem pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

Dikarenakan, pemerintah sebagai salah satu organisme dalam ekologi yang memiliki keterkaitan yang erat antara satu organisme dengan organisme yang lainnya dan saling berinteraksi timbal balik dalam satu mata rantai yang tidak terputus. Karena, konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem. Dengan demikian bahwa, sistem ekologi terbentuk, karena adanya suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka, subsistem yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam rumah tangga organisasi di sebut sebagai ekosistem. Ditambah, setiap komponen yang ada pastinya memiliki fungsi masing-masing.

Selama adanya komponen itu dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka ekosistem itu dapat dikatakan berada dalam suatu titik keseimbangan yang baik. Oleh karena itu, pengambilan keputusan untuk kebijakan dapat dilandasi atas dasar konsep ekologi yang memiliki kaitan yang sangat erat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan saat ini (Putra, 2022). Dapat di ibaratkan bahwa, sebuah sistem itu seperti, organisme dengan organisme yang lain di dalam tatanan ekologi (Putra & Hadi, 2022). Maka, konsep ekologi menjadi salah satu landasan dasar bagi kajian pemerintah di dalam pengambilan keputusan di ruang lingkup daerah. Selain itu juga, efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang telah diputuskan maupun diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh mayoritas penerima manfaat, baik itu yang berupa operasionalisasi pemerintahan dengan sub-sistem dan masyarakat dalam ruang lingkup pemerintahan.

Dalam dunia pemerintahan, maka kebijakan adalah suatu sarana yang sangat penting, karena kebijakan dapat memberikan dampak, baik itu yang berupa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan warga negara. Dikarenakan, kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Bilamana, kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka tujuan pemerintahan akan dapat tercapai dengan baik pada nantinya. Maka, harapan pelaksanaan tugas yang telah diberikan secara langsung oleh pemerintah sesuai dengan penugasan kepada sub-sistem. Disisi lain juga, subsistem pemerintahan yang telah sesuai dengan tugas yang diberikan, maka harus mampu melakukan dengan baik dan benar, agar pada nantinya tidak merugikan tujuan dari pemerintahan tersebut.

Karena, kebijakan diartikan sebagai salah satu proses dalam pengambilan keputusan sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu, sasaran tertentu, dan dalam urutan tertentu. Selain itu juga, kebijakan pemerintah mempunyai arti, yaitu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Untuk itu bahwa, kebijakan adalah sebuah proses manajemen yang mencakup tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan, sehingga kebijakan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh secara langsung dengan melalui adanya proses pengambilan keputusan dari yang memiliki wewenang untuk melakukan implementasi pelayanan publik terhadap pemerintahan. Begitupun dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya secara memadai (Nurdin, 2019). Karena, birokrasi dituntut untuk harus memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas (Cahyono, 2017).

Kecepatan birokrasi dalam pelayanan dengan memangkas terlebih dahulu regulasi, peraturan, sistem yang menghambat, dan penggunaan sistem yang lebih tanggap adalah salah satu ciri keberhasilan dari adanya reformasi birokrasi (Taufan, 2017). Karena, pada organisasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting, dikarenakan itu sebagai ujung akhir dari reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia (Wiratno, 2020). Kualitas pelayanan akan tercipta hubungan yang dinamis antara masyarakat sebagai pengguna dan pihak yang memberikan layanan, karena pelayanan publik itu sendiri berkaitan langsung dengan daya tanggap, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dan sarana maupun prasarana yang diberikan (Khilmiah et al., 2020). Maka, cara yang ampuh untuk mengetahui kualitas pelayanan publik adalah dengan membandingkan pelayanan yang masyarakat terima dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan tersebut (Zamroni et al., 2019). Ditambah, dengan keberadaan dari sumber daya TI yang telah memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas, kualitas produk, kepuasan layanan, memberikan keyakinan layanan kepada konsumen, dan menjadi perangkat pendukung keputusan bisnis yang relevan (Ardiansah et al., 2019).

Keberhasilan dalam penerapan sistem informasi akan mampu dalam menjadi kontributor utama dalam mendukung efisiensi kegiatan operasional, produktivitas, SDM, pemberian layanan, dan kepuasan kepada masyarakat (Saputro et al., 2015). Maka, pengambilan kebijakan diciptakan untuk memelihara dan melindungi berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat dalam pelayanan publik, agar pada nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kedepannya nanti. Dengan demikian bahwa, kebijakan adalah alat untuk melakukan proses implementasi, agar pada nantinya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah pada sebelumnya, sehingga efektivitas dan efisiensi dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem, maka konsep ekologi digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis sistem pemerintahan. Maka, kebijakan pemerintah daerah menurut (Peabody, 2008), adalah: "The concept of authority, like the related concepts with which it is frequently associated-power, influence, and leadership-is used in a variety of ways in political philosophy and the social sciences."

Kebijakan pemerintah dapat dicirikan oleh dua jenis kewenangan keputusan yang sering dikenal dengan: (1) Political authority (wewenang pengambilan kebijakan) dan (2) Administrative authority (wewenang pelaksanaan kebijakan). Sennett argues that authority power, authority and the state need not be legitimate in the eyes of the population. For Sennett, authority is associated with a number of qualities: "assurance, superior judgement, the ability to impose discipline, and the capacity to inspire fear" (Sennett, 1993). Kewenangan yang berasosiasikan dengan jaminan kualitas, penilaian

yang terbaik dalam pengambilan keputusan, menekankan pada disiplin, konsistensi kebijakan, dan kapasitas untuk mengurangi kegagalan kebijakan (Sennett, 1993). Dikarenakan, kebijakan sangat berkaitan erat dengan politik dan administrasi pemerintahan, dengan demikian ibarat sisi mata uang yang tidak dapat untuk terpisahkan.

Dalam aspek politik, maka perumusan kebijakan dalam rangka wewenang pengambilan kebijakan (political authority) biasanya bersifat pengaturan. Sedangkan, dalam rangka wewenang pelaksanaan kebijakan (administrative authority) memiliki sifat pengaturan dan pengurusan. Telah jelas bahwa, kewenangan keputusan yang memiliki sifat pengaturan sangat berkaitan erat dengan legislatif dalam rangka penyusunan aturan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kewenangan terhadap pengaturan dan pengurusan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam aplikasi penerapan pengaturan maupun dalam kehidupan masyarakat di ruang lingkup sehari-hari dalam bentuk kepengurusan dan administratif pemerintahan. Oleh karena itu, urgensi dari adanya pengurusan kebijakan yang harus memiliki sifat pengaturan dan kebijakan yang bersifat pada pengaturan maupun pengurusan dapat dilaksanakan dengan mengacu langsung pada organisme, yaitu ekosistem dalam suatu pemerintahan. Maka dari itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kontribusi ekologi pemerintahan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana metode ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui database Publish or Perish, SINTA, dan Goggle Scholar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik literature review atau kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun, menggali, dan mengumpulkan informasi yang valid, lengkap, serta relevan terkait dengan topik masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik literature review, di mana studi ini dilakukan secara langsung dengan membaca berbagai macam sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan langkah-langkah pada (Nazir, 2014) dan (Arikunto, 2013) sebagai berikut:

- a. Membaca segala bentuk keterangan yang ada dalam penelitian, apakah telah tersedia berbagai keterangan-keterangan yang sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian yang akan dikaji (Nazir, 2014).
- b. Mengumpulkan berbagai bentuk sumber bahan kajian yang telah relevan dengan masalah dalam penelitian (Arikunto, 2013).
- c. Mengutip segala bentuk informasi yang ada pada bacaan itu yang dapat berupa kutasi (mengutip secara langsung), paraphrase (menggunakan kata-kata sendiri)

(Nazir, 2014) dan menuliskan hasil kajian ke dalam kartu yang telah disediakan pada sebelumnya (Arikunto, 2013).

- d. Mencatat hal-hal yang penting dengan melihat terlebih dahulu, mana yang penting dan juga mempelajari indeks di halaman belakang buku untuk mencari halaman yang berkenaan secara langsung dengan apa yang telah dicatat dalam kartu yang disediakan sebelumnya (Nazir, 2014).
- e. Menyimpulkan hasil yang telah diperoleh (Arikunto, 2013).
- f. Melakukan interpretasi atas hasil yang telah diperoleh (Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai proses kebijakan yang memiliki berbagai macam dinamika terhadap karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan, dalam hal ini berkaitan cukup erat dengan berbagai aktor-aktor dalam mengambil kebijakan yang memiliki berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka, kecenderungan itu terjadi dalam kebijakan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa, ketika menyusun suatu kebijakan, di mana pemerintah daerah melaksanakan proses analisis yang begitu mendalam dan terperinci. Hal itu dilakukan, karena kebijakan itu dapat berhubungan secara langsung dengan adanya proses kebijakan yang lain secara timbal balik dan saling berkaitan sangat erat dalam mekanisme keseimbangan pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah yang terkait.

Apalagi, ketika menyangkut terjadinya proses pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik yang menjadikan salah satu langkah awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas (Nurdin, 2019). Ditambah, dengan kehadiran dari seorang pemerintah sebagai pihak yang menyediakan layanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas (Rukayat, 2017). Maka, inovasi dipandang sebagai kebutuhan, karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, dan mengembalikan kepercayaan publik (Andhika, 2017). Dengan adanya pelayanan publik, maka segala bentuk prosedur dan aturan yang jelas sangat diperlukan, agar pelayanan tidak menemui kendala (Yusriadi & Misnawati, 2017). Karena, tujuan dari adanya pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat, maka dari itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, kesamaan, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Nuril, 2018).

Dalam aspek politik, maka perumusan kebijakan dalam rangka wewenang pengambilan kebijakan (political authority) biasanya bersifat pengaturan. Sedangkan, dalam rangka wewenang pelaksanaan kebijakan (administrative authority) memiliki sifat pengaturan dan pengurusan. Telah jelas bahwa, kewenangan keputusan yang memiliki sifat pengaturan sangat berkaitan erat dengan legislatif dalam rangka penyusunan aturan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun,

kewenangan terhadap pengaturan dan pengurusan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam aplikasi penerapan pengaturan maupun dalam kehidupan masyarakat di ruang lingkup sehari-hari dalam bentuk kepengurusan dan administratif pemerintahan. Oleh karena itu, urgensi dari adanya pengurusan kebijakan yang harus memiliki sifat pengaturan dan kebijakan yang bersifat pada pengaturan maupun pengurusan dapat dilaksanakan dengan mengacu langsung pada organisme, yaitu ekosistem dalam suatu pemerintahan.

Konsep Ekologi Pemerintahan

Anonim (2018) menyebutkan bahwa, "ecology is the study of how organisms interact with one another and with their physical environment." Dikarenakan, setiap prinsip dasar ekologi selalu mempertimbangkan ekosistem, habitat, dan hubungan dengan biogeochemical (Odum, 1953). Selain itu juga, Anonim (2018) mengemukakan bahwa, "within the discipline of ecology, researchers work at five broad levels, sometimes discretely, and sometimes with overlap: organism, population, community, ecosystem, and biosphere." Maka, melihat dari substansi ekologi sebagai ilmu pengetahuan, dengan demikian organisasi negara dapat dipandang sebagai ekologi dalam mengatur rumah tangga negara melalui pelaksanaan pemerintahan (Putra & Sihidi, 2022). Karena, pemerintahan dapat diartikan sebagai organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan tetap melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam suatu negara tersebut (Sa'adawisna & Putra, 2022).

Dengan demikian bahwa, perlu sebuah ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik itu dalam segi internal maupun eksternalnya. Karena, berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi yang menimbulkan pemikiran, di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Alexander Von Humbolt (dalam Wulf, 2015) mengembangkan pemikiran ekologi dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa, pemerintahan adalah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem yang lainnya. Berdasarkan asumsi itulah, maka dikembangkan kajian ilmu tentang konsep ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan adalah landasan untuk mengambil kebijakan dalam mengikuti berbagai bentuk proses terkait dengan penyusunan analisis terhadap kebijakan yang disertai dengan berbagai macam sumber daya-sumber daya yang telah langsung diperoleh, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Disisi lain juga, ekologi pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan masyarakat. Dikarenakan,

ekologi pemerintahan dapat dijadikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik itu dalam lingkup (das sein) maupun (das sollen). Maka, kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi gejala, dan peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Karena, kajian ekologi pemerintahan memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Selanjutnya, penggunaan paradigma antroposentrik, yaitu cara pandang pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, dalam penggunaan pendekatan holistik dijadikan sebagai cara pandang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh. Untuk itu bahwa, diperlukan adanya mekanisme yang berfungsi untuk memelihara sistem dalam keadaan seimbang dan dinamis. Karena, reaksi yang berlebihan dari suatu kelompok sasaran kebijakan pemerintah yang tidak diperhitungkan dengan cermat dan tepat dapat menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan dan kejatuhan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, ekologi pemerintahan menjadi landasan alat utama untuk menganalisis bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Hal itu disebabkan, karena adanya hubungan manusia, lembaga pemerintahan dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia mempunyai sifat-sifat tertentu (komunitas), dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Barker (1995) menyampaikan bahwa, pemerintahan yang baik akan melaksanakan "the possibility to live a good life, and to perform beautiful acts" dalam menerapkan konsep ekologi dalam bidang pemerintahan. Karena, ekologi dikatakan sebagai pendekatan, titik pusat ekologi adalah "ekosistem", yaitu sistem ekologi terbentuk, karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta suatu tempat di mana makhluk hidup maupun tidak hidup saling berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai ekosistem. Masing-masing komponen yang ada memiliki fungsinya masing-masing. Selama komponen tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik, maka ekosistem itu berada dalam suatu keseimbangan.

Maka, ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup:

- a. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, sub-sistem pemerintahan, sub-sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan.
- b. Distribusi kewenangan dikaitkan langsung dengan analisis ekologi.
- c. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki oleh pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh "pemerintahan bayangan" terhadap entitas pemerintahan yang formal.

Karena, pemerintahan bayangan adalah kekuatan informal yang bisa memberikan pengaruh sangat kuat terhadap kebijakan pemerintahan dan pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa, ruang lingkup ekologi pemerintahan sangat terkait dan saling bergantung satu sama lain dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai sistem yang harus memiliki kemampuan keseimbangan, agar dapat bekerja secara optimal. Demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem pemerintahan, maka tujuan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan penuh ketentraman dalam sisi masyarakatnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah dapat diarahkan pada keseimbangan dalam semua sektor yang ada dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah. Maka dari itu, keseimbangan ini akan memberikan langkah pada terciptanya daya saing dan keberlanjutan kualitas sumber daya-sumber daya daerah yang ada untuk dikelola dengan baik, sehingga outward looking pemerintahan daerah menjadi faktor penting untuk mengelola pemerintahan daerah yang berdaya saing tinggi untuk kedepannya nanti.

Ekologi Pemerintahan di Indonesia

Berbagai bentuk tantangan pada era saat ini, khususnya dari perspektif ekologi pemerintahan di Indonesia menghadapi tantangan yang begitu berat (Putra & Dhanuarta, 2021). Dikarenakan, terdapat beberapa tantangan di Indonesia yang harus segera dicari solusinya jalan keluarnya seperti, ketidaksiapan pemerintah dalam mengimbangi perubahan yang begitu cepat di kalangan masyarakat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, ketidakstabilan dunia bisnis karena perubahan yang sangat cepat, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi, adanya kesenjangan yang luar biasa terkait dengan tenaga kerja "low-skill/low-pay" dan "high-skill/high-pay", isu keamanan dan privasi data, serta munculnya fenomena "robotisasi" kemanusiaan. Maka, berkaitan dengan tantangan sebagai dampak dari faktor-faktor ekologi pemerintahan di Indonesia dihadapkan pada faktor ekologis yang beraspek alamiah yang terdiri atas faktor letak geografis, sumber daya alam, keadaan, dan tingkat kemampuan penduduk. Sedangkan, faktor sosial yang meliputi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan faktor teknologi yang meliputi teknologi informasi dan inovasi yang mendukung pengembangan otomatisasi ekologi pemerintahan tersebut (Putra & Hijri, 2022). Mengingat beberapa pertimbangan, maka pada kesempatan yang baik ini hanya beberapa faktor dan utamanya faktor-faktor yang bersinggungan secara langsung dengan ekologi pemerintahan itu sendiri.

Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbeda dengan praktik-praktik demokrasi di negara lain, Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu dalam ikatan NKRI. Dikembangkan toleransi antar umat beragama yang sangat dikagumi negar-negara dunia. Walaupun mendapat tantangan akhir-akhir ini dalam berbagai bentuk rongrongan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI namun dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa

Indonesia mampu mempertahankannya. Faktor ekonomi, menurut Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. prediksi terbaru Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 akan mencapai 5,2 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dari prediksi Bank dunia sebelumnya.

Pada April 2018, Bank Dunia merilis proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2018 akan sebesar 5,3 persen. Kendati menurunkan angka proyeksi, Bank Dunia menilai prospek ekonomi Indonesia terus positif hingga akhir tahun ini. Selain faktor permintaan domestik yang menguat, harga komoditas global yang tinggi juga diperkirakan mampu mendorong investasi dan menghasilkan pertumbuhan modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun. Fundamental ekonomi makro yang kuat di Indonesia terus memberikan penyangga yang kokoh terhadap peningkatan gejolak global. Manajemen ekonomi yang baik telah menjaga inflasi tetap terkendali dan tingkat utang hanya sekitar setengah dari ambang batas hukum.

Faktor sosial budaya, bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya sesuai dengan hakikat masyarakat yang ingin selalu mengalami perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Faktor-faktor perubahan sosial budaya terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial budaya antara lain: kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal tingkat toleransi masyarakat.

Masyarakat yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, akan mudah menerima perubahan sosil budaya. Adapun beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan. Faktor pertahanan dan keamanan, bahwa letak geografis Indonesia yang strategis memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Sementara itu, di sisi lain stabilitas keamanan nasional belum kuat. Indonesia masih mengalami masa-masa transisi dan konsolidasi (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan) menuju negara yang demokratis. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multi dimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi.

Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia dituntut dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Khusus faktor ekologis yang sangat penting dan bahkan merupakan faktor inti adalah kependudukan. Dikatakan sangat penting, karena kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia diyakini menjadi penentu utama tingkat kemajuan suatu negara. Paradigma baru manajemen SDM yang disebut human capital bahwa SDM

didudukan sebagai kapital utama setiap organisasi dan beban organisasi. Daya atau kekuatan SDM jika dibina dan dikembangkan dengan tepat merupakan daya/kekuatan organisasi yang sangat besar.

Sebaliknya jika organisasi tidak melakukan dengan baik akan berubah menjadi faktor perusak nomor satu. Mengingat pentingnya dan merupakan faktor strategis dalam ekologi administrasi publik maka faktor SDM harus mendapat prioritas dalam kebijakan publik. Pentingnya pemetaan tantangan dan peluang RIN.4.0 sebagaimana dimaksud dikaitkan dengan ekologi administrasi publik, dimaksudkan untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah permasalahan pengangguran. *Work Emplomentand Social Outlook Trend 2017* memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada 2018 diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa dengan kenaikan tambahan 2,7 juta. Hampir sama dengan kondisi yang dialami negara barat, Indonesia juga diprediksi mengalami hal yang sama.

Sebagai gambaran, faktor kependudukan pada 2017 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Dari jumlah populasi yang besar ini, didominasi oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen. Hal ini terkait dengan kemampuan penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kualitas penduduk suatu negara dapat diketahui dari faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu tingkat pendapatan penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Tantangan yang dihadapi Indonesia juga ditambah oleh tuntutan perusahaan dan sektor industri. Bank Dunia (2017) melansir bahwa pasar kerja membutuhkan multi-skills lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Indonesia juga diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-2040, yaitu penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif. Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan teknis.

Data lain menunjukkan, berdasarkan *Global Innovation Index (GII)* yang mengukur tingkat inovasi negara-negara di dunia, Indonesia masih menempati peringkat di bawah mayoritas negaranegara Asia dan ASEAN. Data *GII 2016 dan 2017* menunjukkan, Indonesia hanya naik satu peringkat dari peringkat ke-88 menjadi ke-87. Sementara Vietnam menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat ke-59 pada 2016 ke peringkat ke-47 pada 2017. Hal ini menunjukkan inovasi belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan

budaya nasional. Forum ekonomi dunia juga melansir, struktur keterampilan abad 21 akan mengalami perubahan.

Dari faktor ekologis teknologi sebagaimana dikemukakan sebagai dampak Revolusi Industri 4.0 telah membawa semua negara harus melakukan perubahan secara mendasar. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, perkembangan teknologi utamanya teknologi informasi telah mengubah cara-cara bekerja. Penyelenggaraan administrasi publik yang semula serba manual dan lamban berakibat daya saing pemerintah menjadi rendah. Masyarakat menuntut pelayanan birokrasi yang lebih cepat, baik, aman, nyaman, dan murah belum dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah. Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar pengelolaannya tidak mungkin dengan cara-cara yang lama.

Masyarakat yang berada sangat jauh dari pusat pemerintahan sering mengalami bahkan tidak terlayani dengan baik. Dampaknya adalah selain semakin banyaknya masyarakat yang miskin pengaruh lebih luas adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/negara. Fenomena Golput pada pemilu/pilkada bahkan pilpres memberikan signal bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Lambannya informasi/kebijakan pemerintah diterima masyarakat juga sering dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Lebih dari itu, penyebaran informasi yang tidak didukung teknologi informasi yang memadai telah berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi publik. Perkembangan problem dan isu publik yang semakin kompleks akan menimbulkan krisis pemerintahan. Negara menjadi lemah dan tidak berdaya menghadapi perubahan besar-besaran akibat proses globalisasi ekonomi, politik dan teknologi. Namun disisi lain, apabila suatu negara memiliki respon dan kesiapan yang baik dalam menyikapi dampak dari globalisasi maka negara tersebut akan menuai keuntungan dari kemajuan-kemajuan, seperti misalnya dalam hal kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi merupakan *conditio sine quanon* dari RIN.4.0 globalisasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh suatu negara dalam banyak hal, termasuk dalam menjalankan sistem administrasi publiknya. Salah satunya dengan penerapan sistem e-government, yaitu penerapan atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap publik, urusan urusan bisnis, serta hal hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam kegiatan admistrasi publik, eGovernment dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan konsep e-Government tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah saat ini, yaitu kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, biaya penggunaan jasa telekomunikasi yang masih cenderung mahal, serta masih banyaknya penyelenggaraan pelayaan publik baik di pusat dan daerah yang belum mengkoordinir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Namun pada akhirnya, apabila konsep e-

Government tersebut berhasil diterapkan dalam birokrasi, maka akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik, seperti halnya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, serta dapat memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, dan kualitas hasil keputusan dalam mengaktualisasikan kebijakan yang akan diselenggarakan dalam proses pemerintahan (Aini et al., 2023). Dikarenakan, Kualitas kebijakan yang kurang menguntungkan akan berdampak pada hasil kebijakan yang tidak efektif dan kurang optimal pencapaian tujuan pelaksanaan pemerintahan di lapangan. Oleh karena, kualitas kebijakan tersebut dapat berdampak ke berbagai dimensi dalam sub dan subsistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan (Wahidah et al., 2023). Dimensi pemerintahan ini dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme.

Asumsi teori ini menyatakan bahwa negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri (Sa'adawisna & Putra, 2023). Dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2017), Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah satu masyarakat paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban lainnya. "Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada makhluk hidup." Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keluarga.
- b. Kehidupan bermasyarakat secara berkelompok.
- c. Kehidupan bernegara.

PENUTUP

Mengenai proses kebijakan yang memiliki berbagai macam dinamika terhadap karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan, dalam hal ini berkaitan cukup erat dengan berbagai aktor-aktor dalam mengambil kebijakan yang memiliki berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka, kecenderungan itu terjadi dalam kebijakan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa, ketika menyusun suatu kebijakan, di mana pemerintah daerah melaksanakan proses analisis yang begitu mendalam dan terperinci. Hal itu dilakukan, karena kebijakan itu dapat berhubungan secara langsung dengan adanya proses kebijakan yang lain secara timbal balik dan saling berkaitan sangat erat dalam mekanisme keseimbangan pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah yang terkait.

Apalagi, ketika menyangkut terjadinya proses pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik yang menjadikan salah satu langkah awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas. Ditambah, dengan kehadiran dari seorang pemerintah sebagai pihak yang menyediakan layanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas. Maka, inovasi dipandang sebagai kebutuhan, karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, dan mengembalikan kepercayaan publik. Dengan adanya pelayanan publik, maka segala bentuk prosedur dan aturan yang jelas sangat di perlukan, agar pelayanan tidak menemui kendala. Karena, tujuan dari adanya pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat, maka dari itu di tuntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, kesamaan, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam aspek politik, maka perumusan kebijakan dalam rangka wewenang pengambilan kebijakan (political authority) biasanya bersifat pengaturan. Sedangkan, dalam rangka wewenang pelaksanaan kebijakan (administrative authority) memiliki sifat pengaturan dan pengurusan. Telah jelas bahwa, kewenangan keputusan yang memiliki sifat pengaturan sangat berkaitan erat dengan legislatif dalam rangka penyusunan aturan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kewenangan terhadap pengaturan dan pengurusan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam aplikasi penerapan pengaturan maupun dalam kehidupan masyarakat di ruang lingkup sehari-hari dalam bentuk kepengurusan dan administratif pemerintahan. Oleh karena itu, urgensi dari adanya pengurusan kebijakan yang harus memiliki sifat pengaturan dan kebijakan yang bersifat pada pengaturan maupun pengurusan dapat dilaksanakan dengan mengacu langsung pada organisme, yaitu ekosistem dalam suatu pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D., Farhaini, A., & Putra, B. K. (2023). Community Participation in Improving Health in Remote Areas: A Literature Review. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(2), 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7798056>
- Andhika, L. R. (2017). Systematic Review: Budaya Inovasi Aspek Yang Terlupakan dalam Inovasi Kepegawaian. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 11(1), 49–62. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/37/19>
- Ardiansah, M. N., Chariri, A., & Januarti, I. (2019). Empirical Study on Customer Perception of E-Commerce: Mediating Effect of Electronic Payment Security. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 122–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jda.v11i2.20147>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Cahyono, E. (2017). *Era Disruption dan Manajemen Strategik Birokrasi*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/era-disruption-dan-manajemen-strategik-birokrasi/>
- Farhaini, A., Putra, B. K., & Aini, D. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Halodoc di Kota Mataram. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2416>
- Khilmiah, A. N., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Administrasi (Studi Tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kantor Desa Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 14(2), 35–39. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8065>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, N. H. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Paranata Edu*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jipe.v1i1.188>
- Nuril, A. (2018). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang: Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/20057/18934>
- Peabody, R. L. (2008). *Authority: Development of the Concept and Comtemporary Issues*. International Encyclopedia of the Social Sciences, Thomson Gale.
- Putra, B. K. (2022). Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i1.7091>
- Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JKN DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5325>
- Putra, B. K., & Dhanuarta, C. B. (2021). Transformation of Public Services Through Electronic-Based Government System in Malang City. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 4(3), 452–459. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5205295>
- Putra, B. K., & Hadi, K. (2022). State and Community Participation in the Democratization Process in Indonesia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others (IJEIT)*, 5(5), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7414335>
- Putra, B. K., & Hijri, Y. S. (2022). Participation of the State and Civil Society in the Democracy System in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 235–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7486365>
- Putra, B. K., & Salahudin, S. (2022). Analysis of Challenges and Potential of the Village Economy Towards Competitive Village Development. *Publik (Jurnal Ilmu*

- Administrasi*, 11(1), 45–61.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.1.45-60.2022>
- Putra, B. K., & Sihidi, I. T. (2022). Keterlibatan Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Proses Menuju Demokratisasi di Indonesia. *Hukum Responsif*, 13(2), 69–80.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7360>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2), 56–65. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2022). The Effect of the Establishment of a New Autonomous Region on Electoral District Regulations in the 2024 General Election. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 484–493.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7269113>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2023). POLITICAL EDUCATION TO INCREASE BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS. *Awang Long Law Review*, 5(2), 419–431.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.716>
- Saputro, P. H., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. J. (2015). Model Delone and Mclean untuk Mengukur Kesuksesan E-government Kota Pekalongan. *Scientific Journal of Informatics*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/sji.v2i1.4523>
- Sennett, R. (1993). *Authority*. New York City (US): WW Norton & Company.
- Taufan, T. (2017). *Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016*. [http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/11892/Naskah Publikasi.pdf?sequence=14&isAllowed=y](http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/11892/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=14&isAllowed=y)
- Wahidah, N., Isro'ullaili, I., & Putra, B. K. (2023). The School Literacy Movement (GLS) and Student's Interest in Reading at SDN 3 Suka Makmur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 559–564.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7826963>
- Wiratno, W. (2020). Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum "Supremasi Hukum"*, 16(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.739>
- Yusriadi & Misnawati. (2017). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99–108. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/4954/2851>
- Zamroni, Z., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(2), 75–82.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/2127/2030>